

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETERLAMBATAN
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

**ISTI NUGRAINI
NIM. 07011181621015**

Konsentrasi Keuangan Negara

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA, OGAN ILIR
Juli 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019*” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 15 Juli 2021.

Indralaya, Juli 2021

Ketua

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Anggota

2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

3. Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

4. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Mengetahui,
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, TEKNOLOGI DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISIONLITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isti Nugraini

NIM : 07011181621015

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2019" Merupakan hasil saya sendiri dibawah supervisi pembimbing, kecuali yang disebutkan dengan jelas sumbernya, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya (Plagiarisme), Maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Sriwijaya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Inderalaya, 03 Juni 2022
Yang buat pernyataan,



ISTI NUGRAINI

NIM. 07011181621015

LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO

**“ Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik.”
(Sri Mulyani)**

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini
saya persembahkan untuk:**

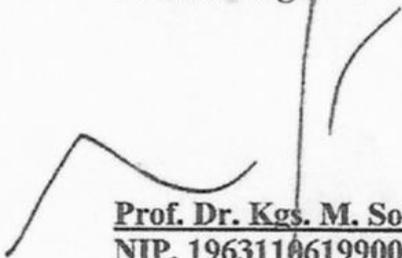
- ✓ Kedua Orangtuaku, Alm. Ayahku
Ary Sapta Nugraha dan
Ibuku Ratna Juwita
- ✓ Keluargaku
- ✓ Tim Riset, Akreditasi dan
Laboratorium Administrasi
Publik
- ✓ Teman-teman Seperjuanganku
- ✓ Almamaterku

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Data yang didapatkan diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Di tahun 2019, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan hanya berhasil menyerap anggaran sebesar 94,40% dari 100% jumlah anggaran yang telah direncanakan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan ialah lemahnya perencanaan anggaran akibat pergantian gubernur dan perubahan acuan serta jarang dilaksanakannya program diklat yang menyebabkan tingkat pemahaman pegawai terhadap informasi baru menjadi berkurang. Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini yaitu meningkatkan frekuensi pelatihan diklat untuk pegawai dan memperbaiki perencanaan terhadap hal-hal yang tidak terduga seperti cuaca agar kegiatan berjalan dengan baik.

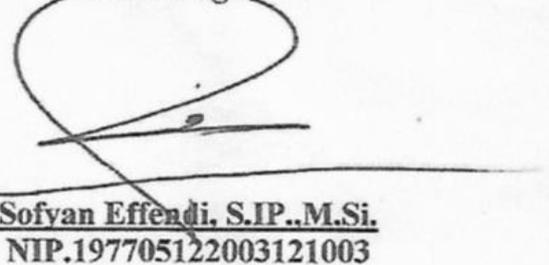
Kata Kunci : Penyerapan anggaran, faktor-faktor, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, keterlambatan, diklat.

Pembimbing 1



Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.SI
NIP. 196311061990031001

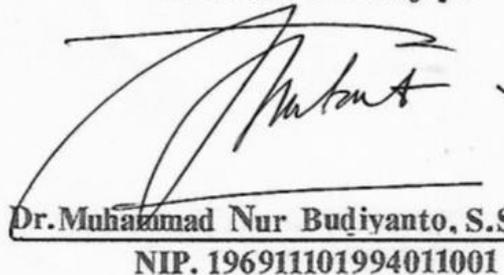
Pembimbing 2



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

Indralaya, April 2022

Ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



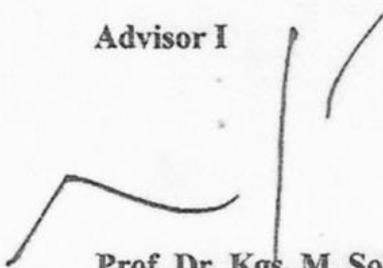
Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of Delayed Factors in Budget Absorption at the Housing and Settlement Service of South Sumatra Province for the 2019 Fiscal Year". This study aims to analyze the factors that cause delays in the absorption of the housing and settlement service budget in the province of South Sumatra ". The research method used is descriptive qualitative method. The data obtained were obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through interviews and documentation. In 2019, the Housing and Settlement Service of South Sumatra Province only succeeded in absorbing a budget of 94.40% of 100% of the planned budget. The results of the research conducted show that the factors that cause the delay in budget absorption of the Housing and Settlement Areas of South Sumatra Province are weak budget planning due to the change of governors and changes in references and the infrequent implementation of education and training programs which cause the level of employee understanding of new information to be reduced. Suggestions recommended in this study are to increase the frequency of training for employees and improve planning for unexpected things such as the weather so that activities run well.

Keywords: Budget absorption, factors, the Department of Housing and Settlement Areas of South Sumatra Province, delay, training.

Advisor I



Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.SI
NIP. 196311061990031001

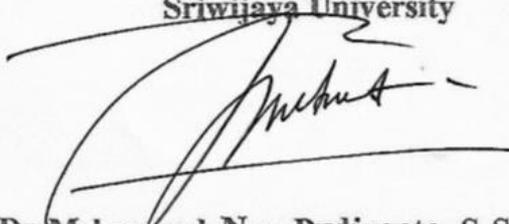
Advisor II



Sofvan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP.197705122003121003

Indralava. April 2022

**Chairman Of Public Administration Department
Faculty Of Social and Political Science
Sriwijaya University**



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-NYA jualah saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis faktor-faktor keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019” ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Tersusunnya skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dengan adanya semangat, bantuan, serta bimbingan sehingga semua hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan semua dukungan, semangat, bantuan, dan bimbingan kepada penulis antara lain :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Keluarga penulis, Terkhususnya Orang Tua Ayah dan Ibu, Ayah Alm. Ary Sapta Nugraha dan Ibu Ratna Juwita yang senantiasa memberikan doa dan kasih sayang serta perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Kgs. M Sobri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Terima kasih kepada bapak Zailani Surya Marpaung., S.Sos., MPA. dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si. selaku ketua dan sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sriwijaya
5. Terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Kgs. M Sobri, M.Si., selaku pembimbing I dan bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak nasihat, dorongan, serta waktunya kepada penulis selama menjalani proses penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah banyak membantu memberikan arahan kepada saya selama perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
8. Terima kasih kepada bapak Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin penelitian di dinas yang beliau pimpin.

9. Terima kasih kepada bapak Riyatno, SE., Ak., selaku kasubbag keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan, masukan, bimbingan, mengizinkan, serta mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada bapak Pajriansah, SE, M.Si. selaku kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang telah banyak membantu untuk menjadi informan penelitian serta memberikan arahan, masukan bimbingan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada ibu Erisa Susanti, ST., M.Si selaku kasubbag perencanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang telah banyak membantu untuk menjadi informan penelitian serta memberikan arahan, masukan bimbingan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada ibu Lia herlina SE. selaku bendahara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang telah banyak membantu untuk menjadi informan penelitian serta memberikan arahan, masukan bimbingan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada saudara-saudaraku, serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa.
14. Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2016 khususnya kampus Indralaya, semoga kesuksesan serta keberhasilan menghampiri kita semua.
15. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian usulan penelitian skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayahNYa atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Apabila masih ada kekeliruan dalam penulisannya, penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Juli 2021

Isti Nugraini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	10
B. <i>Grand Theory</i>	20
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran.....	21
D. Penelitian Terdahulu	22
E. Teori/Konsep yang Digunakan	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Definisi Konsep	27
C. Fokus Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	29
E. Informan Penelitian.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data	32
H. Sistematika Penulisan	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi KKA	35
B. Hasil dan Pembahasan	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan79
B. Saran80

DAFTAR PUSTAKA..... 81

LAMPIRAN 83

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019	4
2. Persentase Realisasi Penggunaan Anggaran Pertriwulan Tahun 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.....	6
3. Penelitian Terdahulu.....	22
4. Fokus Penelitian	29
5. Persentase Realisasi Penggunaan Anggaran Pertriwulan Tahun 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.....	54
6. Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019	54
7. Rencana Penggunaan Anggaran 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.....	56
8. Penggunaan Dana Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.....	65
9. Realisasi Kegiatan Lelang dan Pengadaan Langsung Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.....	67
10. Tabel Tingkat Pendidikan Pegawai Bidang Perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017	74
11. Tabel Golongan Pegawai Bidang Perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017	75
12. Tabel Usia Pegawai Bidang Perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	26
2. Logo Sumatera Selatan dan Kementrian PU	38
3. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.....	52
4. Lemari Besi	71
5. Lemari Kayu	71
6. Printer Epson	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing Usulan Skripsi
3. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
4. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
5. Surat Izin Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palembang (Kesbangpol)
6. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I
7. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II
8. Lembar Revisi Seminar Proposal Pembimbing I
9. Lembar Revisi Seminar Proposal Pembimbing II
10. Lembar Revisi Seminar Proposal Pembahas
11. Lembar Revisi Seminar Proposal Pembahas
12. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
13. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
14. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Skripsi Pembimbing I
15. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Skripsi Pembimbing II
16. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Skripsi Pembahas
17. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Skripsi Pembahas
18. Laporan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019
19. Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019
20. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 Tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPKD	: Badan Pengelola Keuangan Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPJ	: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
OPD	: Operasional Perangkat Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PLT	: Pelaksana Tugas
PLH	: Pelaksana Harian
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PPAS	: Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PP	: Peraturan Pemerintah
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
RKA	: Rencana Kegiatan Anggaran
RKBU	: Rencana Kebutuhan Barang Unit

RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPA	: Rencana Kerja Pendapatan Anggaran
RPBU	: Rencana Pemeliharaan Barang Unit
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIP	: Sistem Informasi Penilaian
SIPD	: Sistem Informasi Penilaian Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPSE	: Sistem Pengadaan Secara Elektronik
TKS	: Tenaga Kerja Sukarela
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui perencanaan yang dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik itu perencanaan jangka panjang maupun perencanaan satu tahunan. Perencanaan dalam satu tahun tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang selanjutnya diturunkan dalam bentuk anggaran kegiatan sehingga menghasilkan dokumen anggaran. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setiap tahunnya berkewajiban menyusun dokumen anggaran. Dokumen anggaran untuk pemerintah pusat diberi nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara dokumen anggaran untuk pemerintah daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik merupakan tugas penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik membutuhkan pengelolaan keuangan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Proses pengelolaan keuangan pemerintahan daerah melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/barang di pemerintahan daerah yang melaksanakan berbagai program yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu pemerintahan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Dalam pelaksanaan program, pengelolaan APBD sangat penting mengingat sumber pendanaan dan pos kegiatan yang dilakukan diatur dalam APBD. APBD merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan. Hal ini didasarkan pada pos-pos pengeluaran yang telah

ditentukan sebelumnya dalam penganggaran. Penyusunan anggaran dilakukan setiap tahun dan anggaran yang sudah disusun serta disahkan akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan daerah berdasarkan prioritas kebutuhan wajib dan kebutuhan pilihan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pos pengeluaran APBD yang mendukung dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal yang digunakan untuk membangun infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, irigasi, perumahan, dan pembangunan fisik lainnya, termasuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan seperti kantor bupati, kantor walikota, dan unit kerja sedangkan belanja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Adanya belanja modal dan belanja barang dan jasa tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah dan sumber daya manusia untuk memberikan manfaat terhadap masyarakat.

Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Termasuk mengatur dan mengurus sendiri urusan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Setiap daerah memiliki anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pertumbuhan ekonomi.

Pelaksanaan anggaran adalah pengeluaran keuangan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi satuan kerja. Setiap

kegiatan yang dijalankan tentunya menggunakan anggaran dalam pelaksanaannya. Tak jarang anggaran setiap lembaga atau kementerian jumlah nominalnya beragam sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan anggaran memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dimulai dari perencanaan, pengajuan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran. Anggaran yang dapat digunakan harus diperiksa oleh badan-badan terkait untuk memastikan bahwa anggaran yang keluar atau digunakan tersebut memang harus benar-benar dibutuhkan dalam kementerian atau lembaga yang melaksanakan kegiatan dan program kerja.

Menurut Mardiasmo (2009:68), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan, dan perencanaan pembangunan”. Peranan APBD sebagai instrumen kebijakan menunjukkan arti penting penyerapan anggaran dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah secara khusus dan nasional pada umumnya. Kualitas penyerapan anggaran berpengaruh terhadap perekonomian daerah sehingga dibutuhkan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang tepat sasaran.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan yang melaksanakan anggaran layaknya kementerian dan lembaga lainnya. Untuk melaksanakan anggaran tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai perencanaan terkait program/kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. Berikut adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

Tabel 1 Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.143.021.130	4.118.770.145
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	775.000.000	749.439.000
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.062.017.495	48.991.495.733
IV	Program Pengembangan Perumahan	83.970.000.000	79.815.238.180
V	Program Lingkungan Sehat Perumahan	36.900.000.000	34.910.096.305
VI	Program Penataan Bangunan	103.200.000.000	94.839.830.750
	Jumlah : 98 Kegiatan	279.050.038.625	263.424.870.113

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana anggaran tersebut berdasarkan kesepakatan bersama pada awal perencanaan tahun anggaran sehingga persentase tersebut menjadi acuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dalam mencairkan atau merealisasi anggaran untuk satu tahun kedepan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan motor penggerak yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan daerahnya. Anggaran sendiri merupakan estimasi kinerja yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan memiliki peran nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sertas stimulus untuk ekonomi daerah jika direalisasikan dengan baik sehingga perlu adanya penyerapan anggaran yang optimal untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 menyebutkan bahwa

penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan anggaran dilaksanakan se-optimal mungkin sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang telah dibuat ditahun sebelumnya. Penyerapan anggaran juga merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Lambatnya penyerapan anggaran menjadi masalah klasik yang terus terjadi setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Pada awal tahun, penyerapan anggaran masih sedikit dan memasuki triwulan III, penyerapan anggaran masih jauh dari harapan, sementara pada akhir tahun yaitu memasuki triwulan IV, penyerapan anggaran meningkat drastis dan terkesan dipaksakan untuk menghabiskan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keterlambatan penyerapan anggaran ini akan mengakibatkan kurang optimalnya realisasi anggaran karena tidak semua target dapat tercapai. Namun, menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun mengakibatkan keterlambatan penyerapan anggaran sehingga ada beberapa pos anggaran yang tidak bisa dikerjakan atau diselesaikan pada tahun berjalan.

Fenomena ini juga terjadi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Dari data yang diperoleh berdasarkan laporan konsolidasi program dan kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman total penyerapan anggaran sampai akhir triwulan III Tahun Anggaran 2019 menunjukkan persentase sebesar 55,70% dari total anggaran. Hal ini menandakan akan terjadi penumpukan penyerapan anggaran pada triwulan IV. Triwulan atau trimester atau kuartal adalah istilah untuk sistem penanggalan yang memiliki makna tiga bulan berturut-turut. Pada penanggalan Gregorian, triwulan dalam satu tahun terdiri dari empat periode Triwulan pertama Januari hingga Maret (90/91

hari), Triwulan kedua: April hingga Juni (91 hari), Triwulan ketiga: Juli hingga September (92 hari), Triwulan keempat: Oktober hingga Desember (92 hari). Kemudian, jika penyerapan anggaran proporsional dengan waktu, seharusnya penyerapan anggaran sampai pada akhir triwulan III mencapai kisaran 75%. Hingga akhir Desember 2019 (triwulan IV) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman baru menyerap APBD sebesar 94,40%. Padahal target yang seharusnya dicapai pada triwulan IV setidaknya tidak kurang dari 95%. persentase tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 258 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penegasan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Berikut adalah tabel persentase penyerpan anggaran yang telah penulis olah berdasarkan laporan konsolidasi program dan kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2019.

Tabel 2 Persentase Realisasi Penggunaan Anggaran Pertriwulan Tahun 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019

Triwulan	Bulan	Persentase realisasi penggunaan Anggaran Pertriwulan tahun 2019 (%)
Triwulan I	Januari – Maret	2,96%
Triwulan II	April – Juni	19,20%
Triwulan III	Juni – September	55,70%
Triwulan IV	Oktober – Desember	94,40%

Sumber: Data Diolah oleh Penulis

Acuan penyerapan anggaran tersebut dibuat pertriwulan sehingga terlihat langsung keefektifan penggunaan anggaran perbulannya. Dari tabel di atas dapat dilihat pada Triwulan ke III penyerapan anggaran baru mencapai 55,70% sedangkan seharusnya pada Triwulan ke III harus sudah mencapai 75%. Hal inilah yang terkadang membuat anggaran menumpuk pada Triwulan ke IV yang mengakibatkan

keterlambatan proses program/kegiatan yang sedang berjalan. Hampir dipastikan bahwa setiap bulan-bulan terakhir tahun anggaran terjadi peningkatan tajam anggaran yang terserap, bahkan terlihat seperti dipaksakan. Artinya rencana pelaksanaan anggaran tersebut tidak sesuai perencanaan atau mungkin karena proses perencanaan yang kurang realistis ataupun adanya efisiensi dalam pelaksanaan anggaran belanja tersebut.

Keterlambatan realisasi anggaran yang bertumpuk pada kuartal terakhir tahun anggaran berdampak pada kualitas kinerja pemerintah. Permasalahan terkait dengan penyerapan anggaran pemerintah antara lain tingkat serapan anggaran rendah (tidak mencapai 100%) dan serapan anggaran yang bertumpuk pada kuartal terakhir tahun anggaran. Pengamatan peneliti, banyak kegiatan baik berupa pembangunan fisik maupun kegiatan pelatihan dan pemberdayaan yang baru dimulai pada bulan-bulan terakhir tahun anggaran. Hal ini menimbulkan persepsi di mata masyarakat jika pemerintah hanya mengejar output kegiatan dan pencapaian realisasi tapi mengesampingkan *outcome* (manfaat) dan kualitas dari kegiatan tersebut. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman provinsi Sumatera Selatan total anggaran belanja daerah sebesar Rp 279.050.038.625 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp 263.424.870.113 atau sebesar 94,40%. Data ini menjelaskan bahwa daya serap anggaran tersebut mengalami keterlambatan dan belum mencapai yang direncanakan karena tidak melebihi 95%.

Fenomena keterlambatan yang menyebabkan minimnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ini sering terjadi dalam setiap tahunnyadan berulang-ulang sehingga permasalahan keterlambatan penyerapan anggaran ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah maupun instansi terkait. Keterlambatan itu sendiri terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor. Ada beberapa

faktor yang telah dipaparkan oleh beberapa penelitian terdahulu dan para ahli. Salah satu faktor tersebut memfokuskan pada 4 faktor yang dikemukakan oleh Halim (2017:81) yakni: Lemahnya perencanaan anggaran, lamanya proses pembahasan anggaran, lambannya proses tender, dan ketakutan menggunakan anggaran. Keterlambatan penyerapan anggaran ini akan sangat mempengaruhi proses perealisasi penyerapan anggaran karena pelaksanaan anggaran merupakan pengendali dan penentu arah yang akan ditempuh oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Dari uraian diatas, untuk mengetahui lebih lanjut tentang penjelasan yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi keterlambatan proses penyerapan anggaran belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan maka permasalahan ini nantinya akan dibahas dalam penelitian ini dengan mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019”**. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis deskripsi terkait Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah “Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan informasi baru bagi jurusan Ilmu Administrasi Publik, Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja serta dapat mengembangkan ilmu yang didapat atau diteliti untuk mengaplikasikannya ke masyarakat luas serta dalam kehidupan sehari-hari.

2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat guna mengambil langkah yang tepat pada peningkatan penyerapan anggaran belanja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul. 2017. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat Mahsun,
Bawono, dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Purwokerto : Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit
dan
Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Salemba Empat
Halim, Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Ed Ke-4). Jakarta:
Erlangga.
Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (3th ed). Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
Pasolong, Harbani.2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.Bandung Percetakan.
Sujarweni, Wiratna . 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Pustaka Baru Press
Yogyakarta.
Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik* (Ed. Ke-6). Yogyakarta:
BPFE Yogyakarta.
Syafii, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik* (Edisi Revisi) Jakarta : PT RINEKA
CIPTA.

Peraturan-Perundangan

- Undang Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Keuangan Daerah.
Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2018 Pasal 1 tentang APBN.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 Tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 Tentang
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga.
Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan No.258 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian
Penghargaan dan Penegasan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian/Lembaga.
Peraturan Mentri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Tentang Belanja.
Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang pengertian APBD.
Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas,
dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera
Selatan.

Jurnal dan Skripsi

- Amirudin. 2009. *Faktor Yang Menyebabkan Minimnya Serapan Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Bengkalis*.
- Anfujatin. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada Skpd Kabupaten Tuban*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Asniarti, 2020. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderating*. 'Tesis'. Universitas Sumatera Utara.
- Hariadi, Paramono. dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herriyanto, H. 2012. *Analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi keterlabatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Jakarta: FEUI.
- Hovart, A. 2005. *Why Does Nobody Care about The Absorption?. WIFO Working Paper*. No. 258. Vienna.
- Indaryanto, Adrir. 2008. *Pengaruh Pelatihan, Motivasi, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Apprentices di Institut Pengembangan Nemangkawai Timika – Papua*. Teses. Tidak Dipublikasikan. Universitas Indonusa Esa Unggul. Jakarta.
- Komang, Ani dkk. 2019. *Analisis Faktor Penyebab dan Akibat Dari Ketidaktepatan Waktu Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 9(1): 59-71.
- Kusuma, I Gede Eka Arya. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Pada Ketepatan Anggaran (Studi Empiris di SKPD Pemerintah Provinsi Bali)*. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Udayana: Bali. Tidak Dipublikasikan.

Lain-Lainnya

- Daftar Urutan Nama, Golongan Pegawai, Usia, dan Tingkat Pendidikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.
- Laporan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019.
- Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019.